



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/786/B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Pengantar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/162/01/2024, tanggal 02 Oktober 2024;
 3. Surat Pengantar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/1352/01/2024, tanggal 01 Oktober 2024;
 4. Surat Pengantar Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/162/01/2024, tanggal 03 Oktober 2024;
 5. Surat Pengantar Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/171/01/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
 6. Surat Pengantar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/0801/01/2024, tanggal 02 Oktober 2024;
 7. Surat Pengantar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/1290/01/2024, tanggal 07 Oktober 2024;
 8. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 000.8.2/966/07/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
 9. Surat Pengantar Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/171/01/2024, tanggal 15 Oktober 2024;


10. Surat Pengantar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/4880/09/2024, tanggal 04 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKREARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/488/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 08 - 11 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/246 /B.07/HK/2024
TANGGAL: 26-6 2024

**1.1 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN ASISTEN**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	0	1,455	1	-1	A	1,455	A
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	1,241	1	-1	A	1,241	A
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	1,287	1	0	A	1,287	A
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1	1,241	1	0	A	1,241	A
	Jumlah	2	5,224	4	-2		1,741	A

**1.2 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
STAF AHLI GUBERNUR LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-
1	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1	1,250	1	0	A	1,250	A
2	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1	1,250	1	0	A	1,250	A
3	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	1,250	1	0	A	1,250	A
	Jumlah	3	3,750	3	0		1,25	A

**1.3 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1	1,47	1	0	A	2,477	A
2	- PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	3	3,517	4	-1	A		
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	5,186	5	-1	A		
4	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3,794	4	-3	A		
5	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,078	1	-1	A		
6	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3,35	3	-3	A		
7	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	-1	A		
8	- KEPALA BAGIAN KERJASAMA, PEJABAT NEGARA DAN LEGISLATIF	1	1,354	1	0	A	2,357	A
9	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2,487	2	-2	A		
10	- PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	2	3,517	4	-2	A		
11	- PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1,5	2	-2	A		
12	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	2,847	3	-1	A		
13	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,078	1	-1	A		
14	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3,35	3	-3	A		
15	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,269	1	0	A		
16	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,481	4	-1	A		
17	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	0,683	1	-1	D		
Jumlah		18	42,113	41	-23		2,477	A

**1.4 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	1.389	1	0	A		
2	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	10	12.533	13	-3	A		
3	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	2.738	3	-1	A		
4	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	3	3.568	4	-1	A		
5	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	5.307	5	-2	A		
6	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	4.904	5	-5	A		
7	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.397	3	-3	A		
8	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.152	1	-1	A		
9	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1.200	1	0	A	3,009	A
10	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	3	4.541	5	-2	A		
11	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	2	2.735	3	-1	A		
12	- PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	2	3.253	3	-1	A		
13	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,32	2	-2	A		
14	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.506	3	-3	A		
	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2.700	3	-3	A		
	Jumlah	27	51.923	55	-28		3.009	A

1.5 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO HUKUM	1	1,482	1	0	A		
2	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA	1	1,374	1	0	A	3,724	A
3	- PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	6,96	7	-1	A		
4	- DOKUMENTALIS HUKUM	1	2,38	2	-1	A		
5	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	-1	A		
6	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI	1	1,016	1	0	A	3,307	A
7	- PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	5,541	6	0	A		
8	- DOKUMENTALIS HUKUM	2	2,548	3	-1	A		
9	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	-1	A		
10	KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	1	1,366	1	0	A	2,189	A
11	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,299	1	0	A		
12	- PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	3	3,607	4	-1	A		
13	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	-1	A		
14	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,166	1	0	A		
15	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	3,798	4	0	A		
16	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,407	2	-1	A		
17	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,569	2	-2	A		
18	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,832	2	-2	A		
	Jumlah	32	43,841	44	-12		3,073	A

**1.6 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN	1	1,453	1	0	A		
2	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	11	13,658	14	-3	A		
3	- PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	2,000	2	-1	A		
4	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	6	9,076	9	-3	A		
5	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,514	2	-2	A		
6	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,700	3	-3	A		
7	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,114	1	0	A	2,954	A
8	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	4,518	5	-5	A		
9	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	2,320	2	-1	A		
10	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,932	3	-2	A		
11	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3,824	4	-3	A		
12	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	1,284	1	-1	A		
13	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,848	3	-3	A		
Jumlah		23	49,241	50	-27	0		A

1.7 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	1,271	1	0	A		
2	- KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	1,202	1	0	A	4,055	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,899	5	(1)	A		
4	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,453	5	(5)	A		
5	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
6	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	4,519	5	(5)	A		
7	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,999	3	(3)	A		
8	- KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	1	1,219	1	0	A	2,980	A
9	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,899	5	(1)	A		
10	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,749	3	(3)	A		
11	- PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	0	1,707	2	(2)	A		
12	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
13	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	4,701	5	(3)	A		
14	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,307	1	0	A		
15	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,582	5	(3)	A		
16	- PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	0	1,646	2	(2)	A		
17	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,584	2	(2)	A		
18	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	4,866	5	(2)	A		
19	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	(2)	A		
20	- KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	1,202	1	0	A	3,535	A
21	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,899	5	(3)	A		
22	- PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	2,332	2	(2)	A		
23	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,407	2	(1)	A		
24	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	5,453	5	(5)	A		
25	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,372	3	(3)	A		
28	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,749	3	(3)	A		
	Jumlah	23	79,165	71	-55		10,57	A

**1.8 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1	1,260	1	0	A		
2	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	5,887	6	0	A		
3	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	2,996	3	-2	A		
4	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	5,609	6	-5	A		
5	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,124	1	0	A	2,974	A
6	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	6,981	7	0	A		
7	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
8	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	2,417	2	-1	A		
9	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,608	2	-1	A		
10	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3,350	3	-3	A		
11	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,078	1	-1	A		
	Jumlah	19	34,717	34	-15		3,156	A

**1.9 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO ORGANISASI	1	1.445	1	0	A		
2	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1	1.417	1	0	A	2,055	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1.647	2	-2	A		
4	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	-2	A		
5	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1.832	2	0	A		
6	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.334	2	-2	A		
7	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	1.407	1	0	A	2,604	A
8	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4.100	4	-1	A		
9	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2.407	2	-1	A		
10	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1.608	2	-2	A		
11	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.302	2	-2	A		
12	KEPALA BAGIAN TATALAKSANA	1	1.399	1	0	A	2,646	A
13	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4.493	4	-1	A		
14	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	-2	A		
15	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	4.524	5	-3	A		
16	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1.433	1	0	A		
17	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1.647	2	-2	A		
18	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	-2	A		
19	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.417	2	-2	A		
20	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	4.524	5	-4	A		
21	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.152	1	-1	A		
22	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1.450	1	-1	A		
	Jumlah	17	50.759	47	-30		2,435	A

**1.10 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO UMUM	1	1,125	1	0	A		
2	- KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	1	1,425	1	0	A	24,974	A
3	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	4	3,661	4	0	A		
4	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	12,629	13	(7)	A		
5	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	5	14,537	15	(10)	A		
6	- PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	3,222	3	(1)	A		
7	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	15	19,598	20	(5)	A		
8	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PENGEMUDI)	15	15,280	15	0	A		
9	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	101,628	102	(102)	A		
10	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	38,610	39	(39)	A		
11	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	15,600	16	(16)	A		
12	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	1	1,167	1	0	A	9,861	A
13	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	15	23,415	23	(8)	A		
14	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	11,235	11	(7)	A		
15	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	11,520	12	(12)	A		
16	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	11,540	12	(10)	A		
17	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,137	2	(2)	A		
18	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	8,029	8	(8)	A		
19	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	(1)	A		
20	- KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1	1,358	1	0	A	8,152	A
21	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	18,911	19	(10)	A		
22	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	5,535	6	(5)	A		
23	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	3	7,779	8	(5)	A		
24	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	19,394	19	(18)	A		
25	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2,170	2	(2)	A		
26	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	10,188	10	(10)	A		
27	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	3,519	4	(4)	A		
28	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA STAF AHLI	1	1,372	1	0	A		
29	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	7,248	7	(5)	A		
30	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	5,415	5	(3)	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
31	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	2	4,418	4	(2)	A		
32	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	13	19,394	19	(6)	A		
33	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,207	6	(6)	A		
34	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,583	3	(3)	A		
	Jumlah	106	413,001	413	(307)	0	42,9870	A

**1.11 REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI LAMPUNG**

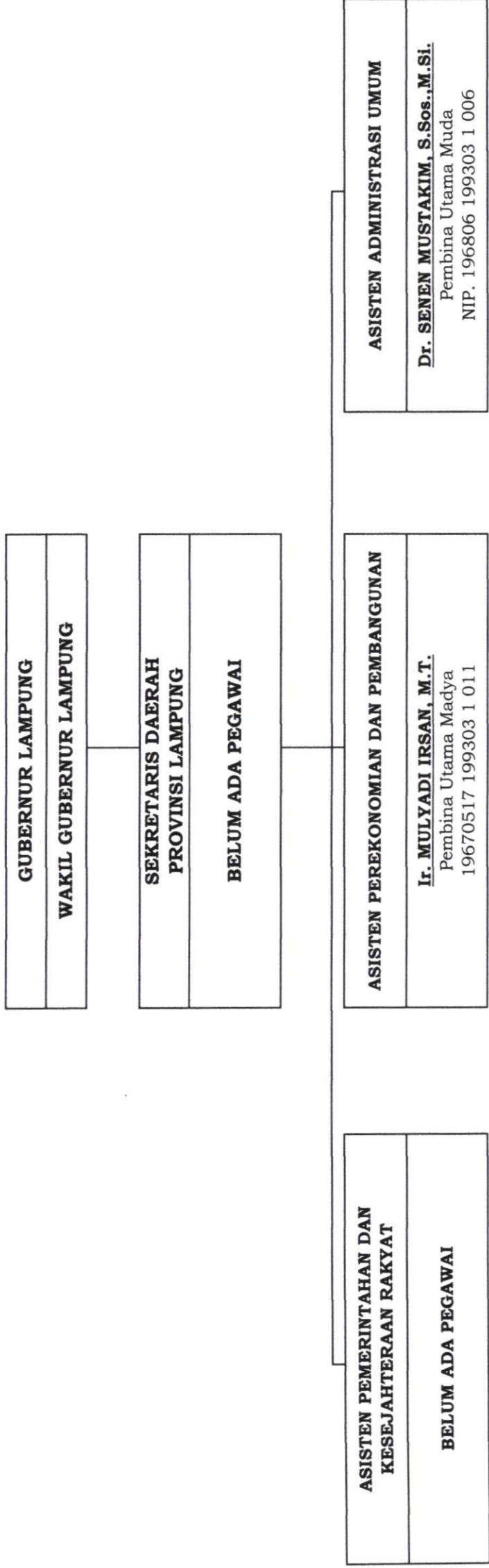
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA / EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1	1,489	1	0	A		
2	- KEPALA BAGIAN PROTOKOL	1	1,373	1	0	A	2,982	A
3	- PENATA KEPROTOKOLAN	0	2,496	2	(2)	A		
4	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	9,684	10	(6)	A		
5	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	1,912	2	0	A		
6	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
7	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	(2)	A		
8	- PENGELOLA KEPROTOKOLAN	0	2,621	3	(3)	A		
9	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	(1)	A		
10	- FASILITATOR PEMERINTAHAN	1	1,248	1	(1)	A		
11	- KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	1	1,498	1	0	A	4,169	A
12	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	3	5,831	6	(3)	A		
13	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,914	2	(2)	A		
14	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	9,037	9	(4)	A		
15	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	(2)	A		
16	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	(1)	A		
17	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,198	1	0	A		
18	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	9,385	9	(3)	A		
19	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,305	2	(1)	A		
20	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3,597	4	(3)	A		
21	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFO	1	3,220	3	(3)	A		
22	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	8,478	8	(8)	A		
23	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,498	1	(1)	A		
24	- KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1	1,473	1	0	A	5,896	A
25	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	7,305	7	(1)	A		
26	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1,658	2	(1)	A		
27	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	10,019	10	(6)	A		
28	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFO	0	3,353	3	(3)	A		
29	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	11,648	12	(12)	A		
30	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,392	1	(1)	A		
	JUMLAH	41	115	110	-69		3,836	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

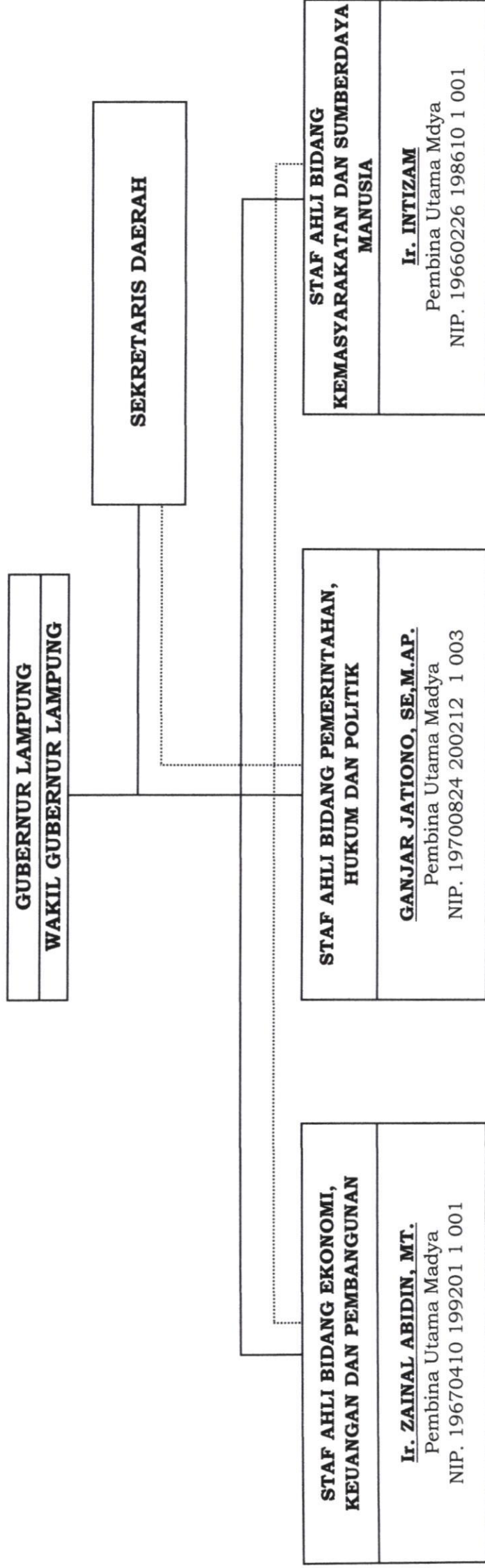


SAMSUDIN

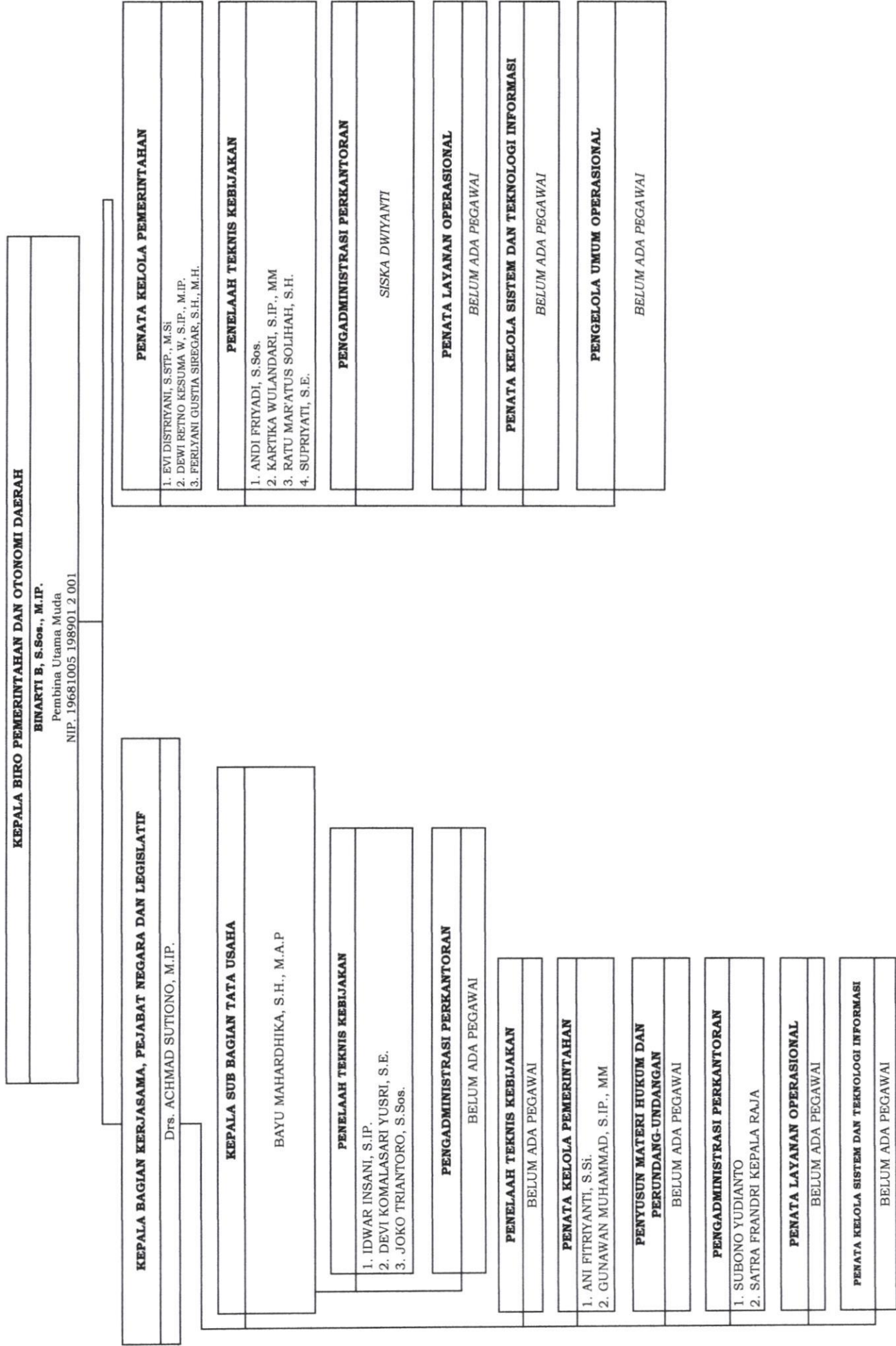
**2.1 PETA JABATAN SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN
HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN**



**2.2 PETA JABATAN STAF AHLI GUBERNUR
HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN**



**2.3 PETA JABATAN MANAJERIAL STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

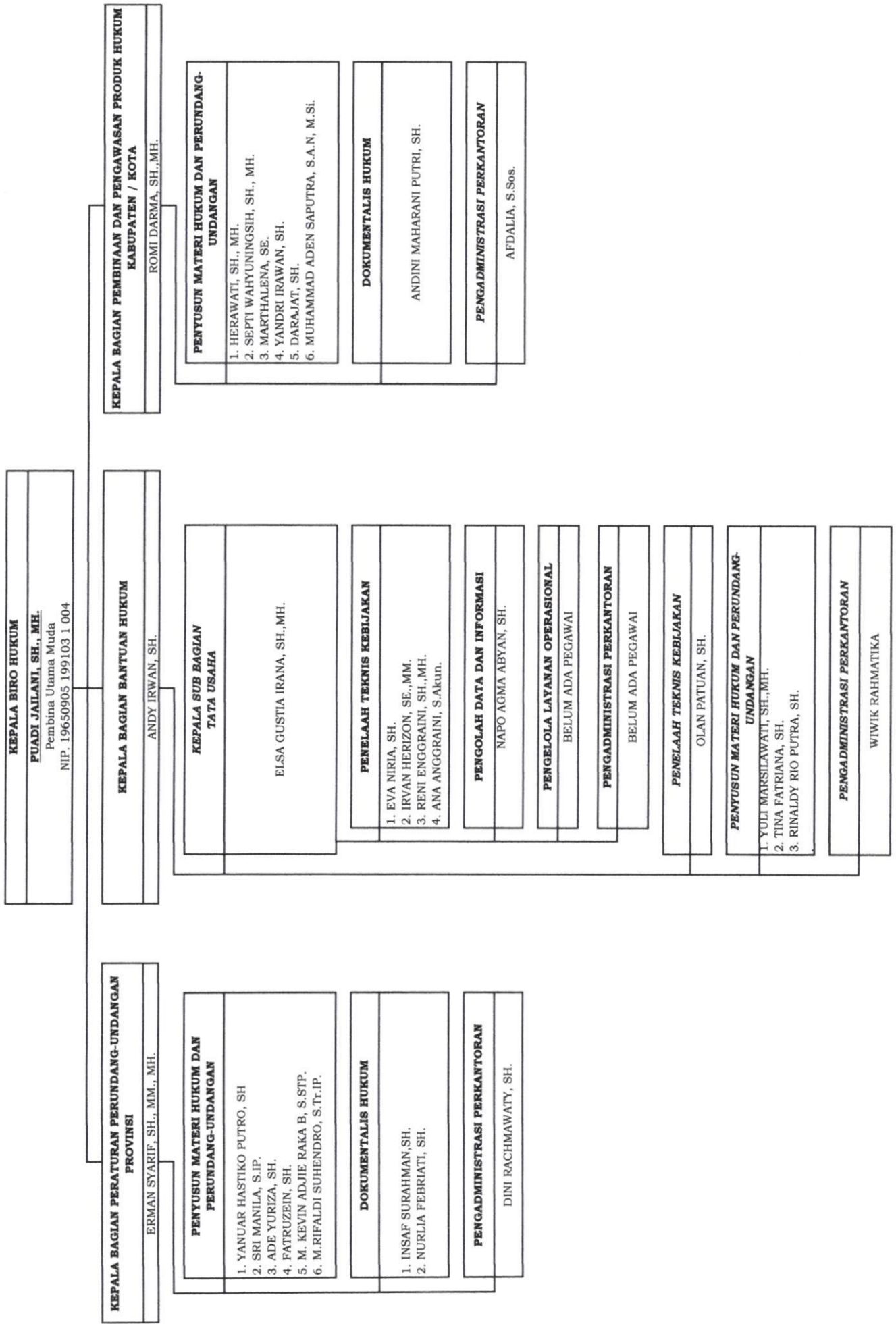


**2.4 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dra. YULIA MEGARIA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 198901 2 001

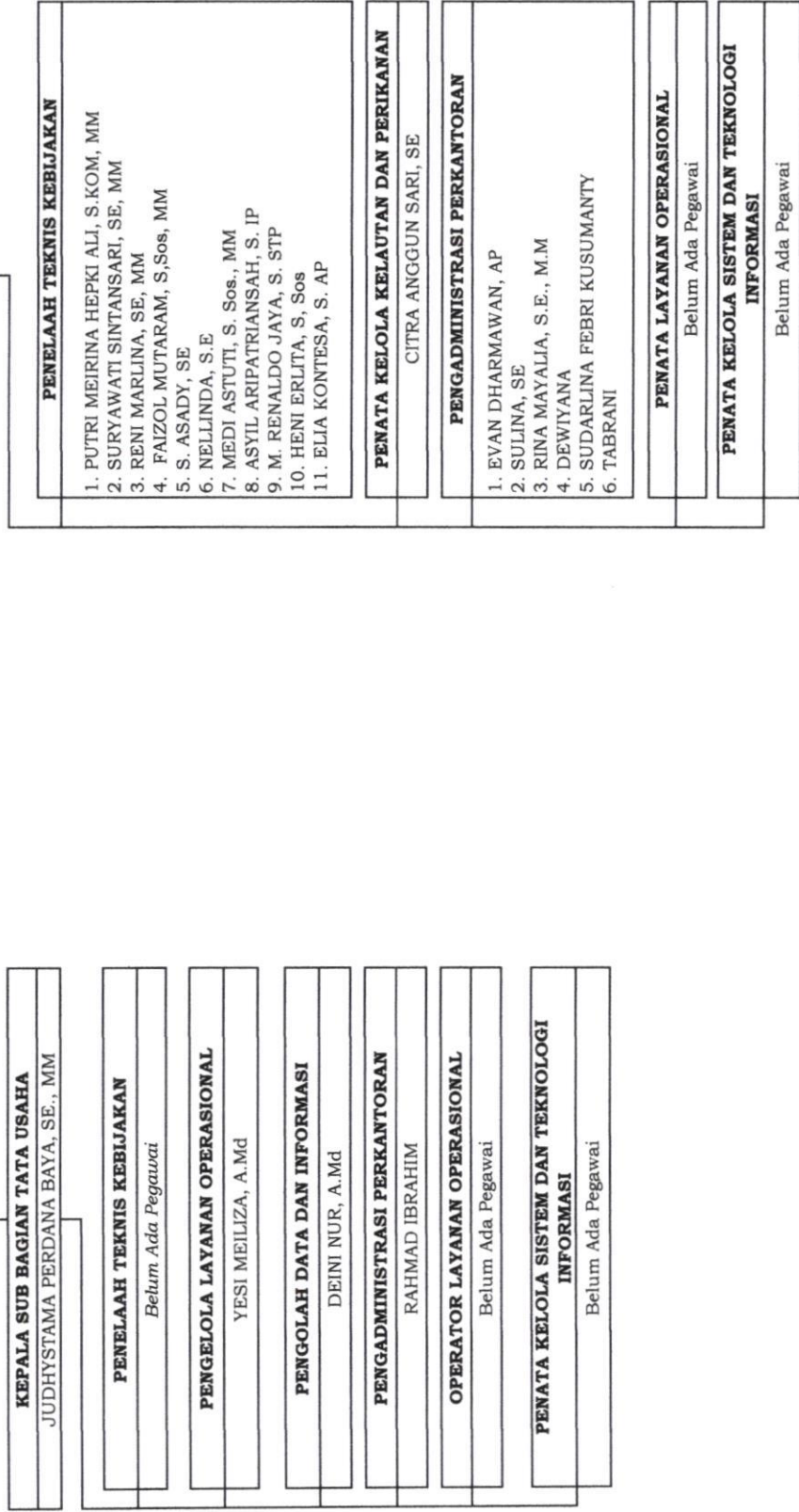
<p>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA</p> <p>LIZA KARMELA, SE</p>	<p>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> MUHAMMAD SOFIANSYAH, SE.,M.M IDA SEPRIDA, SE.,M.Ec.,Dev HALINA, S.Ag ANDRIYANI JAYANI, SH.,M.H SAETI, S.Sos RATHI, SE GITA ARDINA, SE.,M.M DESLIANA, S.Sos TRIANTO JAYA SAPUTRA, S.Kom.,M.Si TRI MULYANTO, SE
<p>PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> NUR CAHAYA, ST. DWITA PRAYOSA, S.I.Kom. NUR AZIZAH SRI WEDARI, A.MD 	<p>PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <ol style="list-style-type: none"> MARDIANA, SE YULVINORA, SE
<p>PENGELOLA DATA DAN INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> FELIX AJI PRABOWO, A.Md DANI KENCANA SARI, A.Md 	<p>PENGELOLA DATA DAN INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> INDAH KUSUMA DEWI, A.Md EVI SUSANTI, A.Md MEIRIZKA PARAMITA, A.Md
<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> MAKMUN NAZARUDDIN 	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> DESTIA AMELIA SEPTIARNI DEWI ANITA TRESIA
<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>
<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>
<p>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>	<p>PENGELOLA UMUM OPERASIONAL</p> <p>BELUM ADA PEGAWAI</p>

**2.5 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

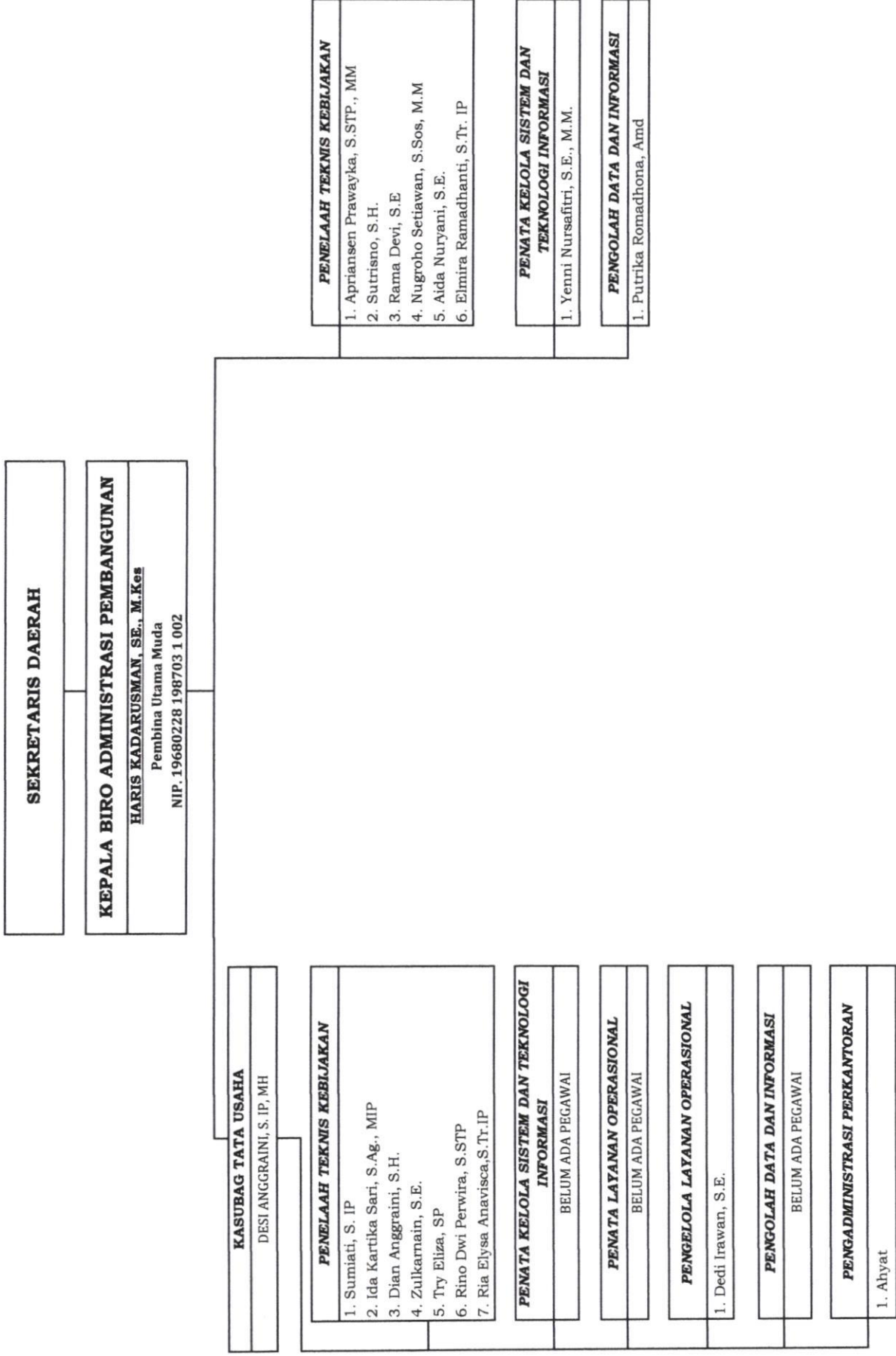


**2.6 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI LAMPUNG**
RINVAYANTI, SE., MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760604 20000302 2 002



**2.8 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL EVALUASI JABATAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

HARIS KADARUSMAN, SE., M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680228 198703 1 002

KASUBAG TATA USAHA

DESI ANGGRAINI, S. IP, MH

PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN

1. Sumiati, S. IP
2. Ida Kartika Sari, S.Ag., MIP
3. Dian Anggraini, S.H.
4. Zulkarnain, S.E.
5. Try Eliza, SP
6. Rino Dwi Perwira, S.STP
7. Ria Elysa Anavisca, S.Tr.IP

PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN

1. Apriansen Prawayka, S.STP., MM
2. Sutrisno, S.H.
3. Rama Devi, S.E
4. Nugroho Setiawan, S.Sos, M.M
5. Aida Nuryani, S.E.
6. Elmira Ramadhanti, S.Tr. IP

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BELUM ADA PEGAWAI

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Yenni Nursafitri, S.E., M.M.

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

BELUM ADA PEGAWAI

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

1. Putrika Romadhona, Amd

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

1. Dedi Irawan, S.E.

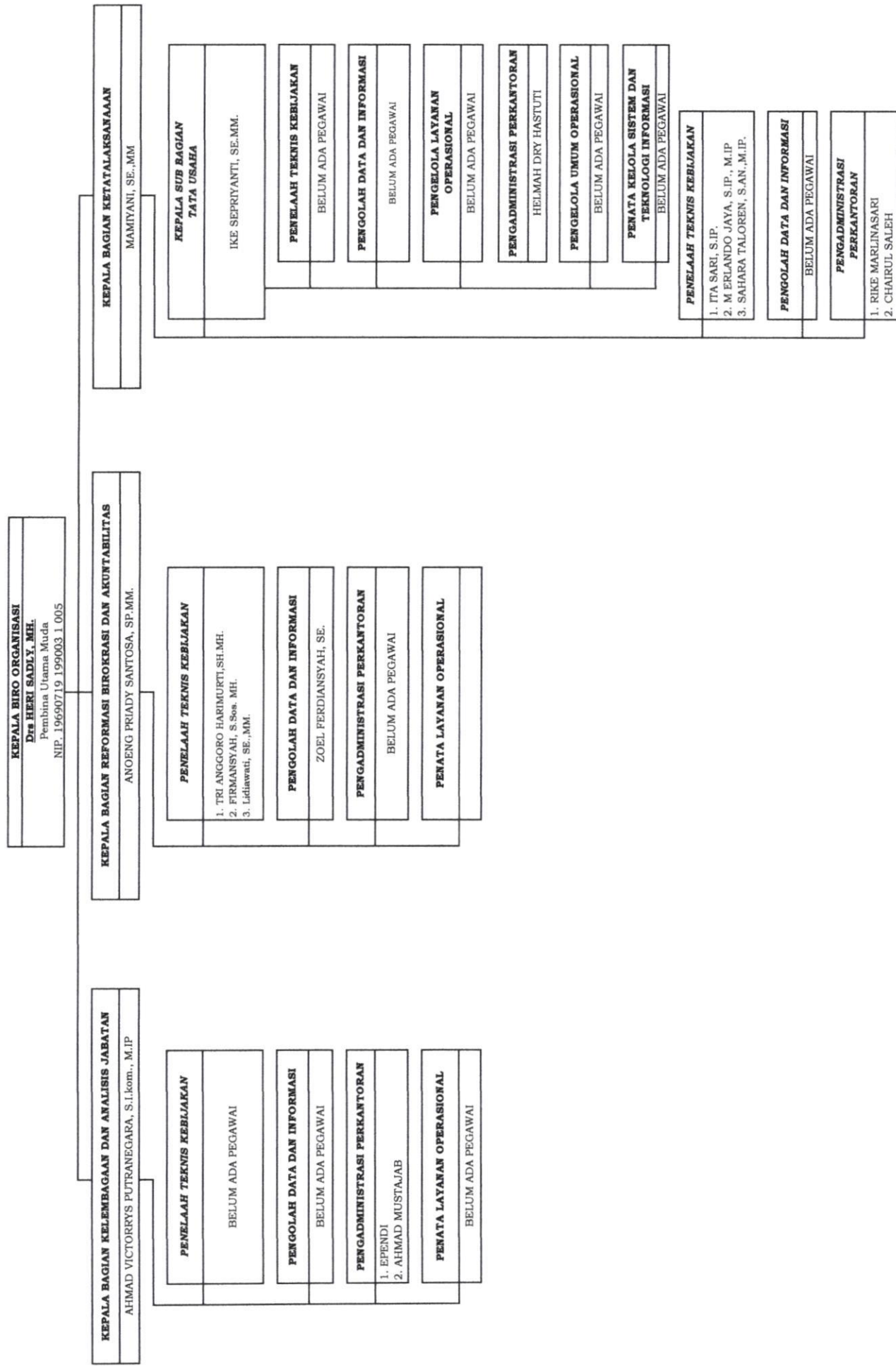
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Ahyat

**2.9 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



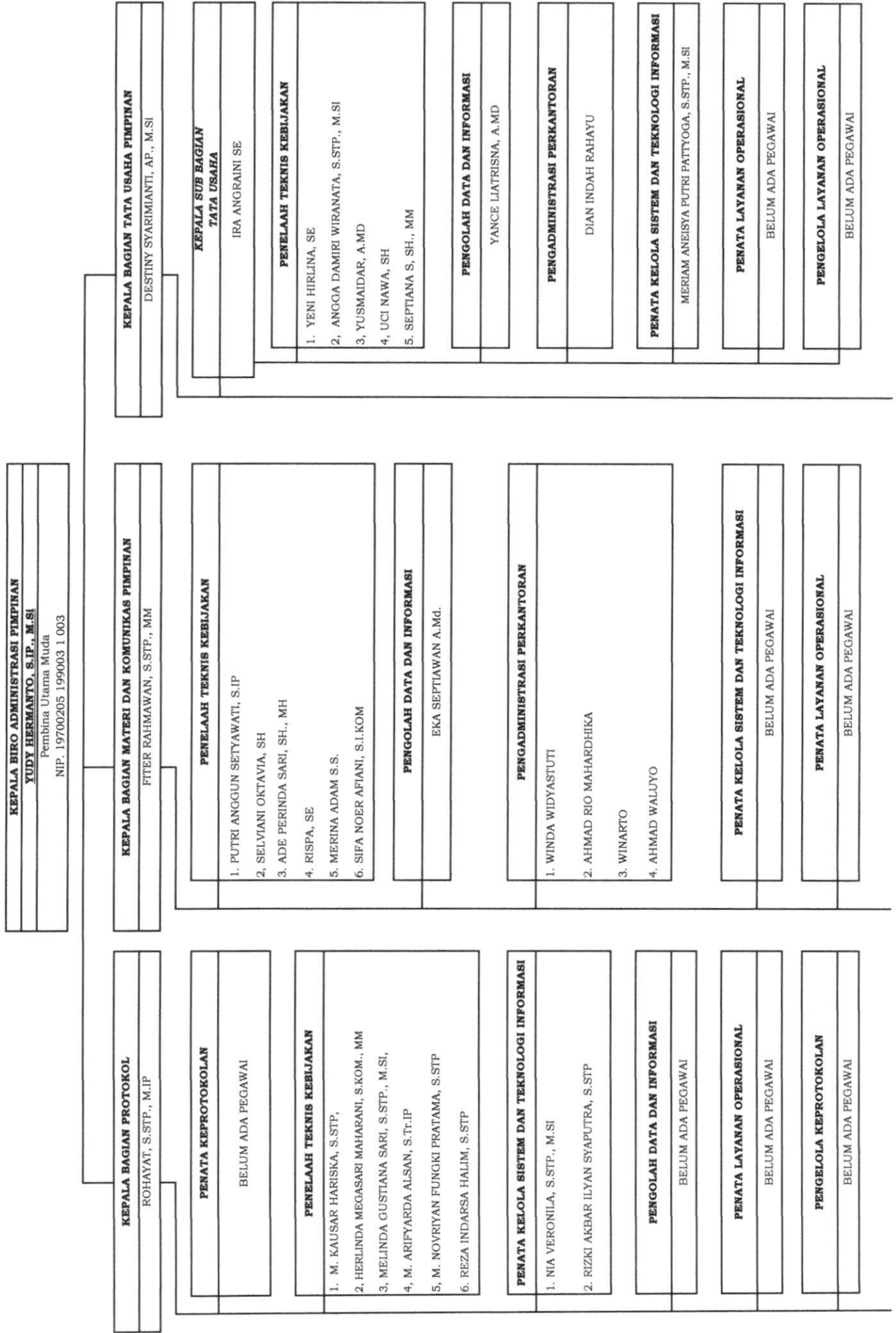
**2.10 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

<p>KEPALA BIRO UMUM MUHAMMAD YULIARDI, S.STP., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19800720 199912 1 002</p>	<p>KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMMU HANIFA, S.STP., M.PA.</p>
<p>KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA MEINI ILHAMUDDIN, S.STP., M.H.</p>	<p>KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASSET HERU ELTANO KINANTAN, S.STP., M.IP.</p>
<p>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. YULITA S.Pd., M.M. 2. MULYONO S.Sos 3. RINA KANTI S.Sos 4. RUSMANSYAH, S.E.</p>	<p>PEREJALAH TEKNIS KEBELAJARAN 1. YUDHI PRANATA S.STP., M.Si. 2. AGNES NABA EGYTA, S.E., M.M. 3. DESY DESFERINA SM, S.E., M.M. 4. AGNESIA BULAN RURIANTI S.E. 5. AGENG PRISTOTO, S.H., M.M. 6. FARVA NINGSIH, S.H. 7. FITRI AGUSTINA SARTI, S.P., M.M. 8. ANDICA MAHDI ISMAIL S.Sos., M.M. 9. FIKRI LESI ARYANTI, S.H. 10. JUNAIDAH AH, S.Kom. 11. MERITANTI S.Sos. 12. DIELA NATARINI, S.IP., M.H. 13. MAHENDRA, S.IP., M.I.P. 14. SUCIPPO, S.E. 15. IKA ZURANDA, S.H.</p>
<p>PENELAHAH TEKNIS KEBELAJARAN 1. JIMMY SURYA PRAJALA, S.STP., M.M. 2. RUSDIANA, S.H. 3. RADEN ISKANDAR, S.E., M.M. 4. PAJRI HORIZON, S.E. 5. MUHAMMAD FADHEL PUSYA NEGARA, S.Tr-IP. 6. AGUS ISMAWAN, S.Sos.</p>	<p>PERGOLAH DATA DAN INFORMASI 1. ZERIZAL, A.Md. 2. TRI PUTRI NURHANI NESIASARI, A.Md. 3. DWI PLESIA, A.Md. 4. SUKMA SYAPTRI, S.E.</p>
<p>PERGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 1. EDI SUPRATO S., A.Md. 2. ANSORI, S.E. 3. IKA ARINI MEISTANTI, A.Md. 4. HAMDY PRIDAU, S.E. 5. INTAN BERLIAN, S.IP.</p>	<p>PERGELOLA LAYANAN OPERASIONAL BELUM ADA PEGAWAI</p>
<p>PERGELOLA LAYANAN KEBERHATAN 1. INDAH WARAS HARTATI, A.Md.Keb. 2. RINA NOVITA SARI, S.A.P.</p>	<p>PERGADINISTRASI PERKANTORAN 1. MUHAMAD KHOTIB 2. HENGRY IRAWAN SUSILO</p>
<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1. HELMI SULAIMAN 2. MARDIONO 3. MARSUDI 4. BURHANUDIN 5. ARIFIN 6. UMARTO NANANG 7. BUDAYA SAPUTRA 8. MARTHA DINATA 9. HENDRO WAHYUDI 10. SUJEB INDRU BUDI 11. HABRI 12. MUHAMMAD ICHSANNUDIN 13. RENDANA PRAMANA PUTRA AGUNA 14. JONSON, S.Sos. 15. MUCHAMMAD FIRMANSYAH</p>	<p>PERATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI BELUM ADA PEGAWAI</p> <p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL BELUM ADA PEGAWAI</p> <p>PERGELOLA UMUM OPERASIONAL BELUM ADA PEGAWAI</p>
<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PENGEMBUDI) 1. APRI SISWANTOAS S 2. HASUNI 3. UJANG 4. ZAINI 5. AGUS TRYONO 6. MUDJIARTO</p>	<p>PEREJALAH TEKNIS KEBELAJARAN 1. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.IP. 2. RUSNIANA DEWI, S.E. 3. Dns. YANTORI, M.M. 4. SEPTI PUJI RAHAYU, S.IP., M.M. 5. FITRI ARSYAD, S.STP., M.Si. 6. MOHD. KAUSAR SANGLAYA, S.STP., M.M. 7. ORZA KRISNAWATI, S.STP., M.M. 8. OKTAFIANSYAH, S.IP. 9. NINA OKTALISA, S.E., M.M.</p>
<p>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA STAF AHLI JOKO SULISTYIO, S.H., M.M.</p>	<p>PEREJALAH TEKNIS KEBELAJARAN 1. PRATUGO S.H., M.M. 2. MUHAMMAD KADHAFY HAMAMTY, S.Sos.</p> <p>PERATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. WARMAN S.T 2. ALHANA RUSIANA TANJUNG, S.Sos., M.Si.</p> <p>PERGELOLA DATA DAN INFORMASI 1. IIN PARLINA, S.Pd. 2. RIA UTAMI PURNABASARI, A.Md.</p> <p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1. ADITHIA REZA ABDULLAH 2. NURHAYATI, A.Md. 3. FITRIA AGUSTINA 4. DEDI ISKANDAR 5. SUMITATUN 6. NANI NURHAYATI 7. DANDIAN 8. SUMARMI 9. TUSINO 10. NURDIN 11. TATI ELIZA WLJAYA 12. SULISTIAWATI 13. SUSILOWATI</p> <p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL BELUM ADA PEGAWAI</p> <p>PERGELOLA LAYANAN OPERASIONAL BELUM ADA PEGAWAI</p> <p>PEREJALAH TEKNIS KEBELAJARAN 1. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.IP. 2. RUSNIANA DEWI, S.E. 3. Dns. YANTORI, M.M. 4. SEPTI PUJI RAHAYU, S.IP., M.M. 5. FITRI ARSYAD, S.STP., M.Si. 6. MOHD. KAUSAR SANGLAYA, S.STP., M.M. 7. ORZA KRISNAWATI, S.STP., M.M. 8. OKTAFIANSYAH, S.IP. 9. NINA OKTALISA, S.E., M.M.</p> <p>PERGELOLA LAYANAN OPERASIONAL CAHYA NUBANI PUTRI, S.Pd.</p>

7. AHMAD SARMIN 8. RUSLANTO 9. AHMAD SUPARI 10. MATAHIR 11. RUSDI 12. ACHMAD S 13. AHMAD JAYA NUORAH 14. HERMANSYAH 15. EKO DRAYANTO
FENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BELUM ADA PEGAWAI
PELAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI
PERLOLOA UMUM OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
1. NURAMINAH, S.IP. 2. IIS SHOLIHAT, A.Md. 3. Drs. LIZA NOVRIANA KIDI
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
MASURAHMAN
PELAYANAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI
PELAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI
PERLOLOA UMUM OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

**2.11 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



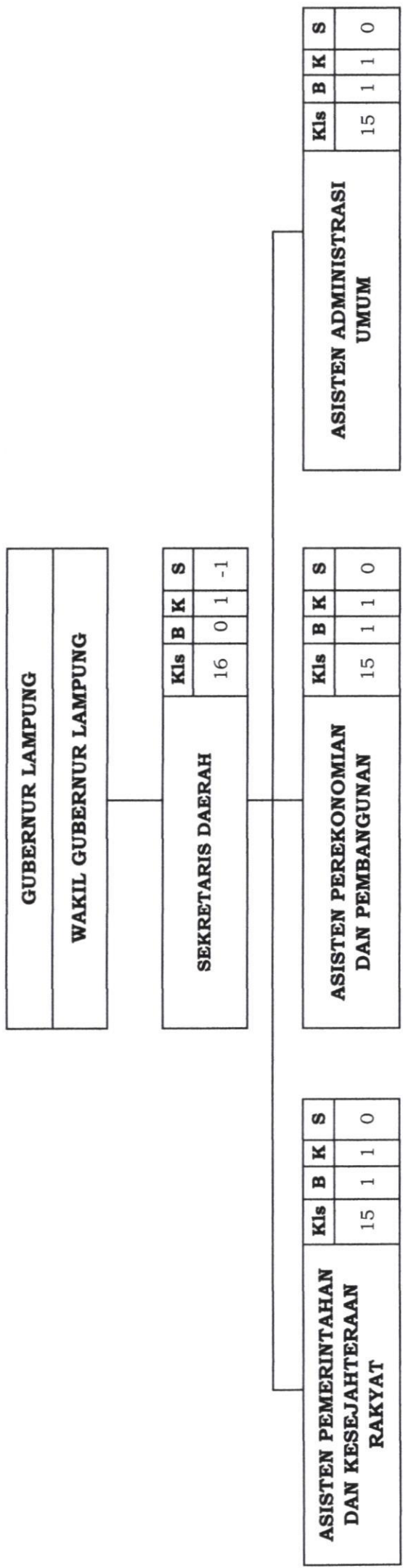
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI	BELUM ADA PEGAWAI
FASILITATOR PEMERINTAHAN	
ALKINDI SULTON FARSEY, S.Tr.IP	
	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
	1. IKA NENSI SINAR MAHARATU ALIYOEN, SE
	2. YULINA, SE
	3. CINDARMI, SE
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
	BELUM ADA PEGAWAI
	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
	1. SUKAR PURWADI
	2. SAINAN
	3. RIZKI FEBRIANSYAH
	4. RIZAL ARSYAD
	5. ACHMAD RAMDHANI
	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
	BELUM ADA PEGAWAI
	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
	BELUM ADA PEGAWAI

Pj. GUBERNUR LAMPUNG

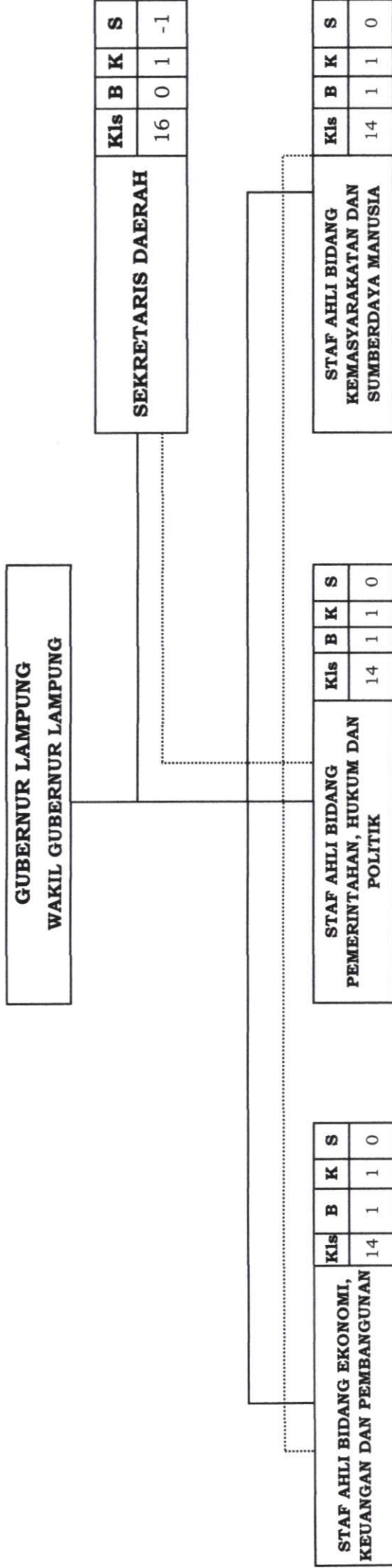


SAMSUDIN

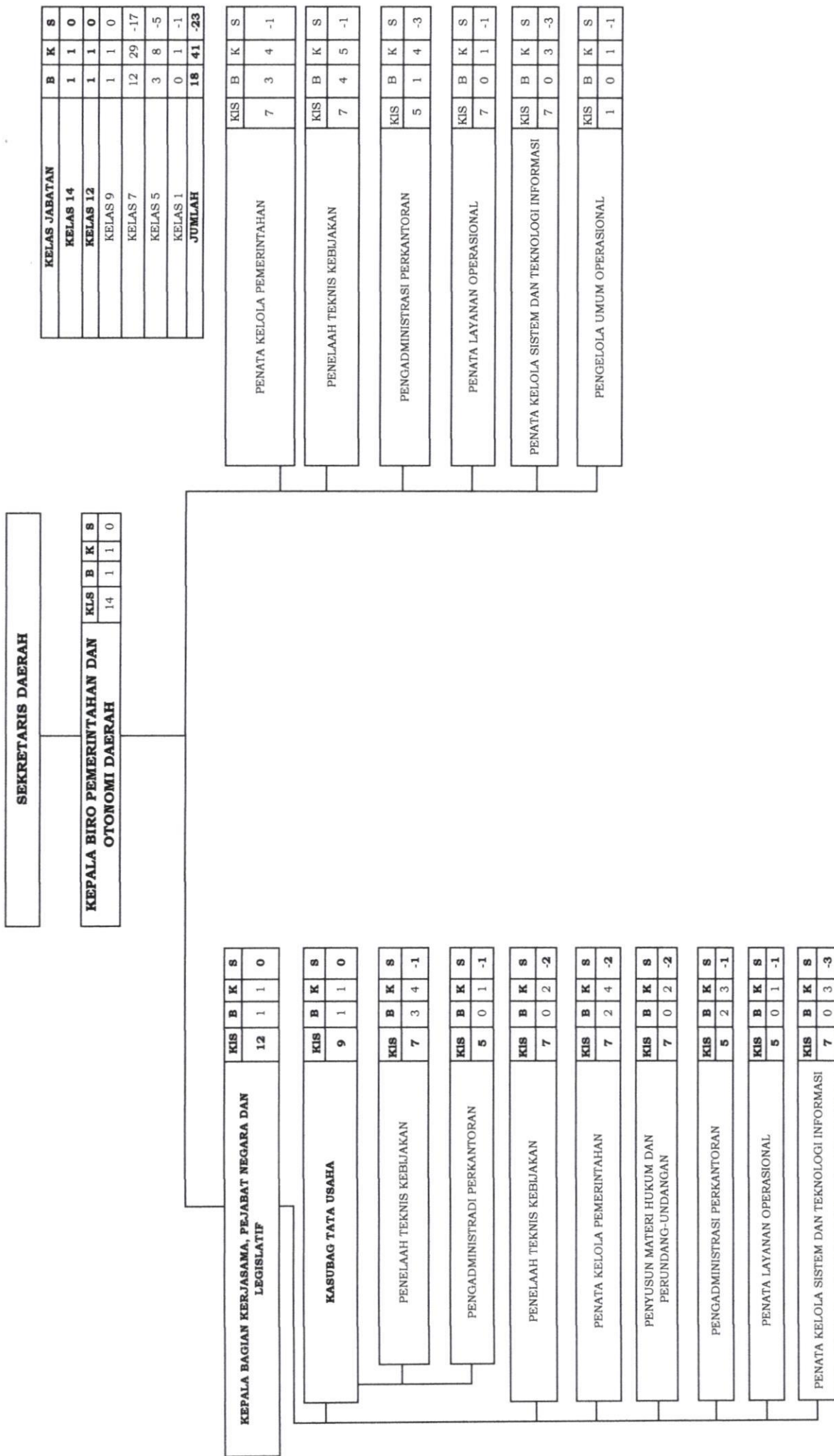
**3.1 PETA JABATAN SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN
HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**



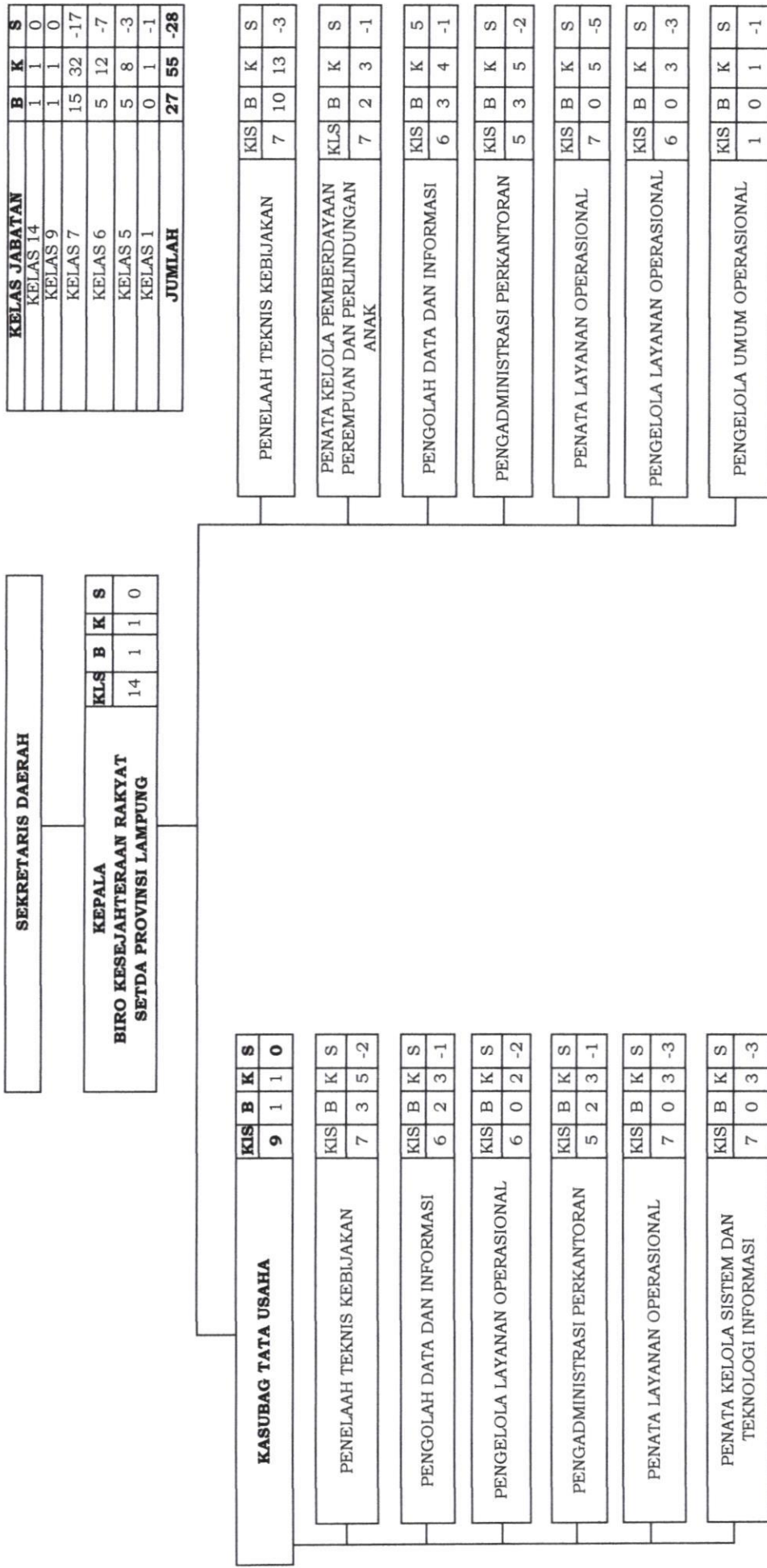
**3.2 PETA JABATAN STAF AHLI GUBERNUR
HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA**



3.3 PETA JABATAN MANEJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG



**3.4 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



3.5 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BIRO HUKUM SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH			
KEPALA BIRO HUKUM			
KLS	B	K	S
14	1	1	0

KELAS JABATAN			
KELAS 14	1	1	0
KELAS 12	3	3	0
KELAS 9	1	1	0
KELAS 7	20	22	-2
KELAS 6	4	9	-5
KELAS 5	3	8	-5
JUMLAH	32	44	-12

KABAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI				KABAG BANTUAN HUKUM			
KIS	B	K	S	KIS	B	K	S
12	1	1	0	12	1	1	0

KABAG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA			
KIS	B	K	S
12	1	1	0

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI				KASUBAG TATA USAHA			
KIS	B	K	S	KIS	B	K	S
12	1	1	0	9	1	1	0

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	6	6	0

DOKUMENTALIS HUKUM			
KIS	B	K	S
6	2	3	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	6	7	-1

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
5	1	2	-1

DOKUMENTALIS HUKUM			
KIS	B	K	S
6	1	2	-1

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI			
KIS	B	K	S
6	1	2	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	6	7	-1

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	0	2	-2

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
5	1	2	-1

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
5	0	2	-2

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

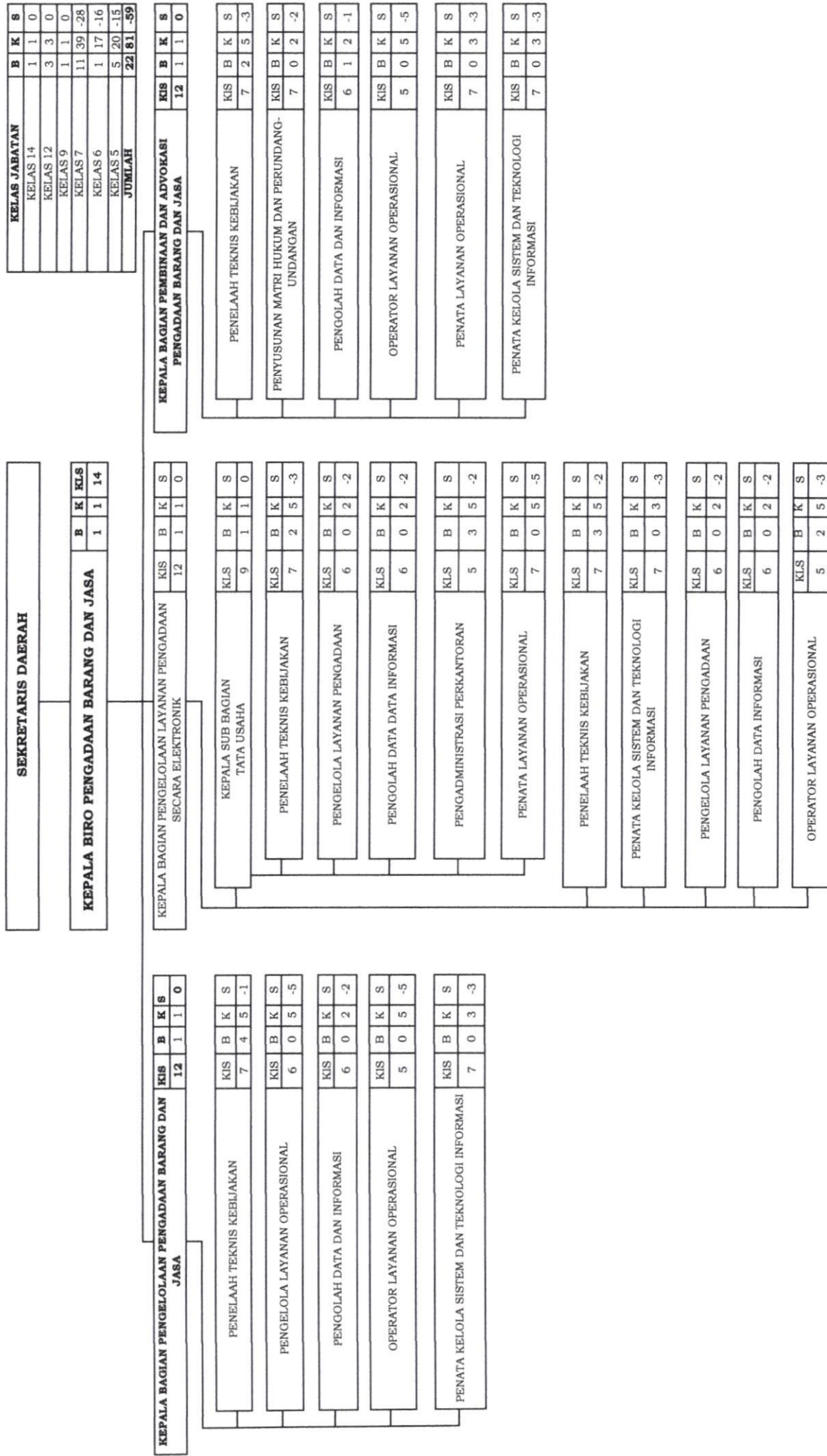
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KIS	B	K	S
7	3	4	-1

3.7 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG



KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 14	1	1	0
KELAS 12	3	3	0
KELAS 9	1	1	0
KELAS 7	11	39	-28
KELAS 6	1	17	-16
KELAS 5	5	20	-15
JUMLAH	22	81	-59

SEKRETARIS DAERAH			
B	K	KLS	
1	1	14	

KIS	B	K	S
12	1	1	0

KIS	B	K	S
12	1	1	0

KIS	B	K	S
12	1	1	0

3.10 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH			
KEPALA BIRO UMUM			
KLS	B	K	S
14	1	1	0
KELAS JABATAN			
KELAS 14	B	K	S
	1	1	0
KELAS 12	3	3	0
KELAS 9	1	1	0
KELAS 7	38	138	-100
KELAS 6	17	62	-45
KELAS 5	31	172	-141
KELAS 3	15	15	0
KELAS 1	0	21	-21
JUMLAH	106	413	-307
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA			
KIS	B	K	S
12	1	1	0
KEPALA BAGIAN TATA USAHA			
KIS	B	K	S
12	1	1	0
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA STAF AHLI			
KIS	B	K	S
9	1	1	0
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
KIS	B	K	S
7	2	5	-3
PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PENGEMUDI)			
KIS	B	K	S
3	15	15	0
PENATA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	39	-39
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
1	0	16	-16
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	0	102	-102
PENATA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	8	-8
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
KIS	B	K	S
7	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	8	-8
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
1	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
5	2	12	-10
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
6	0	12	-12
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI			
KIS	B	K	S
6	4	11	-7
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	0	12	-12
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	15	23	-8
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	15	23	-8
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	3	8	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	1	6	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	3	8	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	0	3	-3
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	9	19	-10
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	1	6	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
6	0	3	-3
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	6	-6
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
5	13	19	-6
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN			
KIS	B	K	S
6	2	4	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI			
KIS	B	K	S
7	2	5	-3
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
KIS	B	K	S
7	2	7	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	2	7	-5
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	10	-10
PENATA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	2	-2
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			
KIS	B	K	S
7	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL			
KIS	B	K	S
7	0	4	-4

**3.11 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH			
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
KLS	B	K	S
14	1	1	0

KELAS JABATAN			
KELAS 14	1	1	0
KELAS 12	3	3	0
KELAS 9	1	1	0
KELAS 7	24	65	-41
KELAS 6	2	15	-13
KELAS 5	10	23	-13
KELAS 1	0	2	-2
JUMLAH	41	110	-69

KEPALA BAGIAN PROTOKOL				KIS	B	K	S
				12	1	1	0
PENATA KEPROTOKOLAN				KIS	B	K	S
				7	0	2	-2
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN				KIS	B	K	S
				7	6	10	-4
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI				KIS	B	K	S
				7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI				KIS	B	K	S
				6	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				7	2	2	-2
PENGELOLA KEPROTOKOLAN				KIS	B	K	S
				6	0	3	-3
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				1	0	1	-1
FASILITATOR PEMERINTAHAN				KIS	B	K	S
				7	1	1	0

KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKAS PIMPINAN				KIS	B	K	S
				12	1	1	0
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN				KLS	B	K	S
				7	6	7	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI				KLS	B	K	S
				6	1	2	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN				KLS	B	K	S
				5	4	10	-6
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI				KLS	B	K	S
				7	0	3	-3
PENATA LAYANAN OPERASIONAL				KLS	B	K	S
				7	0	12	-12
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL				KLS	B	K	S
				6	0	1	-1

KEPALA TATA USAHA PIMPINAN				KIS	B	K	S
				12	1	1	0
KASUBAG TATA USAHA				KIS	B	K	S
				9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN				KIS	B	K	S
				7	5	9	-4
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI				KIS	B	K	S
				6	1	2	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN				KIS	B	K	S
				5	1	4	-3
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI				KIS	B	K	S
				7	1	3	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				7	0	8	-8
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				6	0	1	-1
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI				KIS	B	K	S
				7	3	6	-3
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI				KIS	B	K	S
				6	0	2	-2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN				KIS	B	K	S
				5	5	9	-4
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				6	0	2	-2
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL				KIS	B	K	S
				1	0	1	-1

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN